

# PEMBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI DIMENSI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

**Mubasyaroh**

mubasyaroh@gmail.com/mubasyaroh@stain.ic.id

## **Abstrak**

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka, serta menekankan pada prinsip partisipatori sosial masyarakat (Suharto, 2005:37). Pengembangan masyarakat sebagai metode pekerjaan sosial menunjuk pada interaksi aktif antara pekerjaan sosial dengan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya, masyarakat yang dikembangkan itu terlibat proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS) atau usaha kesejahteraan sosial (UKS).

**Kata kunci** : Pemberdayaan Masyarakat Islam, Ekonomi, Pemberdayaan

## **A. Pendahuluan**

Pengembangan masyarakat identik dengan pendidikan perluasan (*extension educatuion*), yakni pendidikan yang diperluas jangkauannya ke luar peserta didik di luar lembaga pendidikan formal, yakni ke masyarakat. Pendidikan perluasan merupakan pendidikan yang diperluas jangkauannya ke luar peserta didik di luar lembaga pendidikan formal, yakni masyarakat. Pendidikan perluasan merupakan kegiatan kemasyarakatan, yakni pelayanan masyarakat ke dalam upaya memperbaiki dan membangun kehidupan masyarakat. Fasilitator, pendamping atau *community worker* dalam pelayanan masyarakat bertugas memotivasi masyarakat dan turut

serta bersama masyarakat dalam mengembangkan bidang kesehatan masyarakat, pertanian, perekonomian, dan pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat (Sudjana, 2001: 50).

Perlu dipahami sungguhpun *community development* atau pengembangan masyarakat lahir dari tradisi pendidikan massa dan berbasis pada bidang pekerjaan sosial, serta memiliki kemiripan cakupan pendidikan luar sekolah, namun *community development* berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Brokensha dan Hodge, sebagaimana dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi, mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai “ suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat sendiri. ( Rukminto, 2001: 135)

Pada hakekatnya, kegiatan pengembangan masyarakat adalah sebuah pembangunan yang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kemajuan kehidupan diberbagai bidang, yaitu kondisi yang memungkinkan terciptanya partisipasi aktif masyarakat dan adanya kepercayaan penuh pada masyarakat untuk memegang inisiatif tersebut. Pengembangan masyarakat memiliki tujuan yaitu memajukan pada setiap aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial budaya maupun aspek kehidupan lain sehingga tercapai kesejahteraan, selain itu juga untuk membangun kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan, kemandirian, dedikasi terhadap tujuan komunitas dan kerjasama.

Pada sisi lain Suharto (2005:37) berpendapat bahwa pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka, serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial masyarakat. Pengembangan masyarakat sebagai metode pekerjaan sosial menunjuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dengan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya, masyarakat yang dikembangkan itu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu program pembangunan, kesejahteraan sosial (PKS) atau usaha kesejahteraan sosial (UKS).

Pada hakekatnya, kegiatan pengembangan masyarakat adalah sebuah pembangunan yang menciptakan kondisi yang menguntungkan

bagi kemajuan kehidupan diberbagai bidang, yaitu kondisi yang memungkinkan terciptanya partisipasi aktif masyarakat dan adanya kepercayaan penuh pada masyarakat untuk memegang inisiatif tersebut. Pengembangan masyarakat memiliki tujuan yaitu memajukan pada setiap aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial budaya maupun aspek kehidupan lain sehingga tercapai kesejahteraan, selain itu juga untuk membangun kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan, kemandirian, dedikasi terhadap tujuan komunitas dan kerjasama.

Adapun Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Dalam praktek pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty allevation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*), karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan (*income generating*).

## **B. Pembahasan**

### **1. Teori Pengembangan Masyarakat Islam**

Sejarah perkembangan pengembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pengalaman bangsa Inggris mengembangkan daerah koloni mereka. Istilah pengembangan masyarakat didefinisikan dan diadopsi pada tahun 1948 untuk menggantikan istilah pendidikan (*mass education*). Model intervensi pengembangan masyarakat mempunyai sejarah yang panjang dan terkait dengan disiplin Ilmu Pendidikan dan Ilmu Kesejahteraan sosial. Di Amerika Serikat, akar dari pengembangan masyarakat, menurut Brokensha dan Hodge, bersumber dari disiplin pendidikan terutama program perluasan pendidikan di tingkat pedesaan (*rural extension program*), yang diperkenalkan pada akhir abad ke-18.

Sejalan dengan pengertian *community development* di atas, menurut Edi Suharto, pengembangan masyarakat merupakan metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka, serta menekankan pada prinsip partisipasi masyarakat. (Suharto, 2005: 37).

Pengembangan masyarakat berusaha untuk memberdayakan individu dan kelompok orang dengan menyediakan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghasilkan perubahan di komunitas mereka sendiri. Keterampilan ini sering diciptakan melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial yang besar bekerja untuk sebuah agenda bersama. Komunitas pengembang harus memahami baik bagaimana bekerja dengan individu dan bagaimana mempengaruhi posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih besar.

Pengembangan masyarakat melibatkan perubahan hubungan antara orang biasa dan orang-orang dalam posisi kekuasaan, sehingga setiap orang dapat mengambil bagian dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dimulaidari prinsip bahwa dalam masyarakat manapun ada banyak pengetahuan dan pengalaman yang jika digunakan dengan cara yang kreatif, dapat disalurkan ke dalam tindakan kolektif untuk mencapai tujuan masyarakat yang diinginkan.

Pengembangan masyarakat dalam hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah “membantu klien (pihak yang diberdayakan), yakni kaum dhu’afa untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. (Isdandi Rukminto Adi, 2002: 162).

Sementara itu menurut Jim Ife (2005: 182) pemberdayaan merupakan penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kepastian mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan yang lebih baik.

Adapun target dan tujuan pemberdayaan tergantung atas pilihan bidang kesejahteraan sosial yang digarap, baik bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun bidang pendidikan. Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan bertujuan agar kelompok yang diberdayakan menyadari potensi, kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri sendiri guna

memenuhi kebutuhan pokok mereka, serta mengembangkan pola hidup sehat melalui tindakan

Dalam hal ini tahapan pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan intervensi dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

**a. *Assessment* (Penilaian)**

Bertujuan untuk menentukan ketepatan serta efektivitas program dalam upaya pengembangan masyarakat. *Assessment* ini mencakup *needs assessment*, identifikasi masalah, analisis masalah, dan *resources assessment*.

**b. *Plan of treatment* (Rencana tindakan)**

Adalah sebuah proses dalam mengidentifikasi, memilah, menghubungkan masalah atau kebutuhan dengan sumber-sumber yang dapat didayagunakan untuk memecahkan masalah dan atau memenuhi kebutuhan melalui serangkaian kegiatan.

**c. *Treatment* (Tindakan)**

Mencakup atas tindakan monitoring dan evaluasi. Monitoring memberikan dua manfaat yaitu memberikan informasi untuk pegangan sementara program masih sedang belangsung. Kemudian dilakukannya tindakan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang ditujukan baik kepada pelaksanaan program (proses maupun hasil), maupun kepada kerjasama di antara semua pelaku.

**d. *Terminasi* (pelepasan)**

Merupakan langkah penghentian sementara (sekuensi) kegiatan pengembangan masyarakat yang mungkin kelak ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan berikutnya. (Budi Wibhawa, dkk, 2010: 111,110)

Menurut Michael Sheradon (2006:27) pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi setidaknya mencakup tiga bidang pengembangan, yaitu:

1. Aset manusia (*human aset*) berkaitan erat pada pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Menurut Michael Sharadon, *human Capotal* ini termasuk pada golongan aset tidak nyata. Human

asset secara umum meliputi intelegensi, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, ketrampilan dan sebagainya.

2. Pengembangan aset modal keuangan (*financial asset*), meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi dan komponen produksi lainnya. Salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh para pelaku perekonomian kecil baik yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, perdagangan, maupun jasa adalah sulitnya mendapatkan modal khususnya kredit usaha.
3. Pengembangan *social asset* (aset sosial). Aset sosial menurut Michael Sjeradon meliputi keluarga, teman koneksi, atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit dan tipe aset lainnya

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat, merupakan bagian dari pengembangan masyarakat, karena itu konsep pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep pengembangan masyarakat secara umum tidak jauh berbeda serta tidak terlepas dari konsep besar dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Konsep tersebut meliputi ciri atau karakter pengembangan yang berdasarkan tiga hal utama yang bersifat adaptif terhadap masyarakat.

Dalam pengembangan masyarakat Islam, steackholder berperan:

1. Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, mencari sumber dana dan menentukan pengalokasian dana, menyediakan pelayanan langsung kepada masyarakat, membangun proyek, membuat kontrak dengan pihak lain untuk membangun hubungan, membuat hukum, penciptaan regulasi sebagai bentuk implementasi hukum yang dibuat, melakukan negosiasi dan persuasif guna mendukung program yang telah direncanakan, memastikan semua pihak mendapatkan hak yang sama didepan hukum kemuian membuat rancangan pembangunan.
2. Organisasi sebagai salah satu indikator dalam mendukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.
3. Masyarakat adalah sebagai penerima manfaat dari upaya yang direncanakan oleh pemerintah. (Rubin & Rubin. 1992; 27)

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam pengembangan masyarakat Islam pemerintah juga memiliki peran dan kontribusi, sehingga apa yang dilaksanakan akan sesuai harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Dimensi Ekonomi sebagai Wujud Pengembangan Masyarakat Islam**

Terdapat banyak dimensi dalam pengembangan masyarakat Islam, salah satunya adalah pengembangan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini dilakukan karena diantara kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan dalam hal ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam hal ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin atau *dhuafa*, kelompok lemah ini akan sulit berkembang jika tidak dibantu, sehingga mereka akan sulit untuk memperoleh *equality* (kesetaraan) dengan kelompok lain yang dari segi promodalan dan aset yang dimilikinya memungkinkan untuk dapat bersaing dan melakukan percepatan kemajuan hidup.

Dalam hal ini, pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berdasarkan beberapa langkah yang perlu diperhatikan, baik dalam lingkup umum maupun khusus. *Pertama*, melakukan analisis kebutuhan. Seseorang agen harus dapat mengenali apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ia harus melakukan *need assesment*. Analisis kebutuhan dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan di dalam memetakan apa yang mestinya diperbuat untuk pemberdayaan masyarakat.

*Kedua*, melakukan analisis situasi sosial atau *social analysis*, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai hambatan dan potensi, baik fisik maupun non-fisik yang mempengaruhi atas hidupnya masyarakat, dan kemudian menempatkan hasil analisis kebutuhan tersebut di dalam peta hambatan dan potensi yang dimaksud.

*Ketiga*, menemukan berbagai program yang layak dijadikan sebagai basis pengembangan masyarakat, mungkin akan ditemui sekian banyak program yang relevan dengan analisis kebutuhan dan analisis situasi sosialnya.

*Keempat*, menentukan alternatif program yang diprioritaskan. *Kelima*, melakukan aksi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program prioritas. *Keenam*, melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan program dan faktor-faktor penyebabnya. Melalui evaluasi ini akan ditindaklanjuti program berikutnya.

Masyarakat merupakan obyek tetapi juga sekaligus subyek pembangunan, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan tenaga pengembang masyarakat (pekerja sosial) sejauh mungkin diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, yakni masyarakat yang mampu merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan dan menilai usaha dalam memenuhi kebutuhannya.

Pengembangan masyarakat yang pada intinya merupakan pembangunan kesejahteraan sosial (PKS) oleh masyarakat itu sendiri meliputi pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk mencegah anak-anak terlantar atau diperlakukan salah (*abuse*)

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering dipahami sebagai perwujudan dari pengembangan masyarakat (*community development*) yang lahir dari tradisi pendidikan massa (*mass education*) dan berbasis pada bidang pekerjaan sosial (*social work*), serta memiliki kemiripan cakupan dengan pendidikan luar sekolah; namun *community development* berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri.

Pemberdayaan kaum dhu'afa membutuhkan proses yang berkesinambungan sebagai siklus yang terdiri dari 5 tahapan utama; 1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan pengalaman yang tidak memberdayakan (*recall dipowering and empowering experiences*). 2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan (*discuss reason for depowerment and empowerment*). 3. Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek pemberdayaan (*identify one peroblem or project*). D. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna bagi pemberdayaan (*identify useful power bases*) dan e. Mengembangkan rencana-rencana aksi pemberdayaan dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*). (Isbandi, 2002:62).



Adapun konsep pemberdayaan ekonomi konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (1999) secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial. (<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html> )

Kegiatan pemberdayaan melalui perekonomian ini dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan untuk pemberdayaan kaum *dhu'afa'*. Menurut al-Asfahani, perkataan *dhu'afa'* merupakan lawan dari *quwwah* yang berarti kuat. Kemudian, menurut Imam Khalil, pakar nahwu, sebagaimana dikutip oleh Isfahani, istilah *dhu'afa'* biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan lemah fisik, sedangkan *dhu'afa'* biasanya digunakan untuk menunjukkan lemah akal atau pendapat (al-ra'yu). ( Isfahani, tt: 234)

Dalam konsep masyarakat Islam, yang lebih mendapat sorotan untuk dikembangkan atau diberdayakan adalah kelompok *dhu'afa'* secara ekonomi yang biasa disebut sebagai fakir miskin.

Sedangkan berdasarkan asal katanya miskin dalam bahasa arab berasal dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang, statis (tidak dinamis). Sedangkan fakir dari kata *faqr* yang berarti tulang punggung. Fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan tulang punggungnya”. Sedangkan menurut jumhur ulama fakir miskin adalah mereka yang tidak tercukupi kebutuhannya. Dengan demikian komunitas fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya, baik sandang, pangan, papan serta segala kebutuhan pokok lainnya, baik keperluan pribadinya maupun tanggungannya.

Al-Raghib al-Isfahani dalam kitab *Mufrodath al-Qur'an* ketika menjelaskan makna dan maksud istilah *dhi'af-an* pada Surah al-Nisa'/4:9 menyatakan bahwa istilah ini memiliki beberapa pengertian *dha'if fi al-jism* yakni lemah secara fisik; *dhaif fi al-'aqli* yakni secara intelektual.; *dhaif fi al-halli* yakni lemah karena keadaan sosial ekonomi yang dihadapinya.

Lebih lanjut al-Qur'an mengajak kaum muslimin untuk memperhatikan kaum *dhu'afa'* :” Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang lalai dari shalatnya; orang-orang yang berbuat riya, dan enggan menolong dengan barang-barang berguna ( QS. Al-Ma'un: 1-7).

Kandungan surat ini menyadarkan kita bahwa orang beriman yang taat beragama, tekun shalat, serta rajin dzikir dan membaca al-Qur'an, serta berulang-ulang menunaikan haji dan umrah akan tetap dikelompokkan sebagai pendusta agama, jika ketaatan beribadahnya tidak melahirkan kepedulian sosial terhadap kaum *dhu'afa*..

Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Disamping itu, Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Disamping itu, Keterpurukan perekonomian yang mengakibatkan menurunnya daya saing bangsa, kesenjangan pendapatan diantara masyarakat, dan bertambahnya pengangguran, menimbulkan dorongan dari dari berbagai pihak untuk menemukan / menetapkan adanya suatu tatanan ekonomi baru yang lebih mengandung keseimbangan dan memberi harapan. Langkah besar yang diperlukan menuju pada tatanan ekonomi baru, melalui ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan. Hal ini memerlukan tatanan ekonomi yang mapan, sehingga pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dalam rangka peningkatan perekonomian umat. Tatanan ekonomi itu adalah tatanan kehidupan ekonomi umat manusia yang bertujuan untuk mencapai *kemuliaan dan keselamatan* mengandung arti kebahagiaan berupa fasilitas tersedia bagi masyarakat seperti : sandang – pangan, papan, pendidikan, kesehatan yang dicapai dengan cara – cara dan jalan yang benar, sehingga memberikan keselamatan yang seimbang antara : Diri (orang –

perorang ) dengan lingkungan, Lahiria dengan batiniahnya, Kepentingan jangka pendek dengan jangka panjangnya, Kepentingan dunia dengan bekal kehidupan akhiratnya. Cara – cara yang benar menyangkut standar – proses – aturan – hukum umum dan syariat agama yang melingkupinya. Cara yang benar adalah perumusan yang dihasilkan dari satu proses penetapan yang disepakati menurut banyak profesi yang terlibat. Sedangkan *jalan yang benar* menyangkut siklus – siklus kegiatan menurut tingkat –tingkat kegiatan ekonomi yang diselenggarakan pada masing – masing kelompok masyarakat pada kapasitas yang optimum menurut kriteria keseimbangan yang menjadi dasarnya.

Jalan yang benar berarti jalan dengan arah yang benar untuk mencapai esensi kehidupan yang dapat diperiksa dan ditelusuri untuk memastikan bahwa jalan yang dilalui itu dilakukan dengan taat asas dalam mencapai esensi tujuannya. Jalan yang benar itu selalu bermuatan “etika dan norma–norma”. Berdasarkan pada perumusan tujuan ini, kita dapat menambahkan indikator ekonomi dengan distribusi pendapatan untuk melihat tingkat pemerataan, maupun jalan yang ditempuh – *good governance index* dalam mencapai tujuan ekonomi.

Dalam hal ini pemberdayaan ekonomi difokuskan terhadap kaum dhu’afa’. Permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan telah ada sejak lama pada hampir semua peradaban manusia. Pada setiap belahan dunia dapat dipastikan adanya golongan konglomerat dan golongan melarat. Dimana golongan yang konglomerat selalu bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan golongan yang melarat hidup dalam keterbatasan materi yang membuatnya semakin terpuruk.

Pada sebagian besar pendapat manusia mengenai kemiskinan pada intinya mereka berpendapat bahwa kemiskinan menggambarkan sisi negatif, yaitu pengamen yang membuat tidak nyaman pengguna jalan raya, pengemis, gubuk kumuh dibawah jembatan layang yang nampak tidak indah, mencemari sungai karena membuang sampah sembarangan, penjambretan, penodongan, pencurian, dll. Dengan demikian, kemiskinan sangat identik dengan kotor, kumuh, malas, sulit diatur, tidak disiplin, sumber penyakit, kekacauan bahkan kejahatan.

Dari segi sosial, kemiskinan penduduk dapat juga disebutkan sebagai suatu kondisi sosial yang sangat rendah, seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang tidak mencukupi dan penerangan yang minim (Sumardi dan Dieter, 1985). Kondisi sosial lain dari penduduk miskin biasanya dicirikan oleh keadaan rumah tangga dimana jumlah anggota keluarga banyak, tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga rendah, dan umumnya rumah tersebut berada di pedesaan (BPS, 2002).

Dari segi ekonomi, rumah tangga miskin dicirikan oleh jenis mata pencaharian pada sektor informal di pedesaan maupun di perkotaan, sering berpindah-pindah mata pencaharian dari produktivitas yang rendah sehingga menyebabkan pendapatan yang rendah. Jadi kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Tak hanya di desa-desa, tapi juga di kota-kota. Di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, misalnya, tidak terlalu sulit kita jumpai rumah-rumah kumuh berderet di bantaran sungai, atau para pengemis yang berkeliaran di perempatan-perempatan jalan.

Dalam pandangan Islam kemiskinan berasal dari bahasa arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat Allah Swt. menggunakan istilah itu dalam firman-Nya:

*"... atau orang miskin yang sangat fakir" (QS al-Balad [90]: 16).*

Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqr, berarti membutuhkan (al-ihtiyaaj). Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh.

Allah Swt. sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, tidak hanya manusia; seluruh makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan, pasti Allah menyediakan rezeki baginya. Tidaklah mungkin, Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rezeki bagi mereka.

Pemberdayaan terhadap masyarakat lemah diperlukan karena bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya / kemampuan yang dimiliki.

Selain itu pemberdayaan juga untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Aspek terpenting dari proses yaitu bahwa proses harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan ini tak akan tercapai tanpa partisipasi penuh. Proses pengembangan masyarakat tidak dapat dipaksakan dari luar, dan tidak dapat ditentukan oleh pekerja masyarakat, dewan lokal atau departemen pemerintah. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi proses masyarakat yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh mereka sendiri. Hal ini tidak selalu mudah dicapai, karena orang-orang terbiasa dibebankan, dan menyesuaikan dengan pedoman dasar. Namun tidak mungkin ada pengembangan masyarakat dengan memberikan pembebanan. Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Segala sesuatu yang berjalan dalam satu masyarakat, tidak akan mungkin bisa sama dengan masyarakat lainnya karena perbedaan karakteristik tersebut. Atau melakukan penerapan kegiatan dan cara intervensi yang sama. (Jim Ife, 2006 : 348,349)

Dalam pengembangan masyarakat Islam, ada hal lain yang perlu diperhatikan bahwa berbagai program pemberdayaan kaum *dhu'afa* dan masyarakat miskin di tidak akan pernah mencapai pengakaran, jika gagasan, perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi program pemberdayaan tersebut sepenuhnya datang dari pihak pendamping, tanpa melibatkan, membicarakan, membahasnya sesama mereka secara terus menerus dan berkesinambungan. (Ismail, 2008: 293).

Lebih lanjut perlu dipahami bahwa proses pelibatan mitra pendamping kader kesehatan, kader pemberdayaan ekonomi keluarga maupun ibu-ibu majlis ta'lim yang peduli masalah sosial membutuhkan kesungguhan, waktu dan kesabaran sehingga mereka menyadri bahwa masalah yang dibicarakan adalah masalah untuk kepentingan mereka sendiri bukan yang lain.

Pada sisi lain, pengembangan masyarakat Islam melalui pemberdayaan kaum *dhu'afa* juga dapat diarahkan pada ranah afektif dan konatif yakni melalui kesadaran dan dorongan kuat kepada ibu-ibu kader majlis *ta'lim* untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan menyadrikan mereka akan pentingnya peningkatan kuakitas diri dalam bidang kesehatan, ekonomi maupun kualitas hidupnya.

Disamping itu, dalam pengembangan ekonomi juga dengan menumbuhkan wirausaha atau *enterpreneur*, yaitu kemandirian ekonomi melalui usaha dan beketja sendiri dengan mengembangkan potensi yang ada, tanpa harus tergantung pada orang lain. Sehingga, masyarakat akan memberdayakan potenso yang dimilikinya.

Dalam hal ini, pengembangan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari pengembangan masyarakat, karena konsep pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep pengembangan masyarakat secara umum tidak jauh berbeda serta tidka terlepas dari konsep besar dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Konsep tersebut meliputi ciri atau karakter pengembangan yang berdasarkan tiga hal utama yang bersifat adaptif terhadap masyarakat, yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis berkelanjutan (*suistable*).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan masyarakat Islam adalah:

*Pertama*, program pengembangan ekonomi harus berbasis pada masyarakat (*community based*), artinya masyarakat bertindak sebagai pelaku atau subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pengembangan ekonomi. Masyarakat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan yang diperlukan serta pelaksanaannya. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama (*selective decision*).

*Kedua*, mengembangkan ekonomi masyarakat hendaknya berbasis pada sumber daya setempat (*local resource based*), artinya program pengembangan ekonomi masyarakat yang ingin dilakukan berdasarkan pada sumber-sumber yang tersedia pada daerah tersebut.

*Ketiga*, program pengembangan ekonomi hendaknya berprinsip berkelanjutan, artinya program yang dirancang tersebut harus dapat berfungsi sebagai motor penggerak awal, tidak berhenti pada akhir suatu program.

Sementara itu, pada tataran praktis, upaya-upaya pengembangan ekonomi masyarakat berkaitan erat terhadap persoalan pemihakan pada mikro dan kecil dengan berkolaborasi dengan kelompok usaha yang ada di sekitar usaha mikro tersebut. Yang harus menjadi perhatian dan fokus adalah pemerataan ekonomi.

### **C. Kesimpulan**

Pengembangan masyarakat merupakan usaha untuk memberdayakan individu dan kelompok orang dengan menyediakan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghasilkan perubahan di komunitas mereka sendiri. Keterampilan ini sering diciptakan melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial yang besar bekerja untuk sebuah agenda bersama. Komunitas pengembang harus memahami baik bagaimana bekerja dengan individu dan bagaimana mempengaruhi posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih besar.

Sedangkan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan ekonomi yang ada dalam masyarakat agar dapat mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ife, Jim, 2006. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Ismail, Asep Usman, 2008, *Pengamalan al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta: Dakwah Press
- Rubin & Rubin. 1992. *Community Organizing & Development*. New York: Machmilan Publishing Company.
- Rukminto A, Isbandi 2012, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Rukminto, Isbandi, 2001' *Pemberdayaan, Pengembangan Msyarakat dan Intervensi*
- Sudjana, 2001, *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung dan Azas*, Bandung: Falah Production
- Suharto, Edi, 2010. *CSR & COMDEV*. Bandung: Alfabeta
- Wibhawa, Budi, Santoso Tri Raharjo & Meilany Budiarti. 2010, *Dasar-Dasar Pekerja Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran

